EKSISTENSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILU TAHUN 2009-2014 DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
dalam Bidang Politik Islam

Oleh:

INTAN TRISANDI
1544300012

PRODI POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2018

NOMOR : B-888 /Un.09/IV.I/PP.01.1/05/2018

SKRIPSI

EKSISTENSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILU 2009-2014 DI KOTA PALEMBANG

disusun dan dipersiapkan oleh :

INTAN TRISANDI

NIM. 1544300012

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 26 April 2018

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 197111242002312100 1

Sekretaris

Nico Oktario Adytyas, M.A

Pembimbing I

Betv, S.Ag,M.A
NIP:19700421 199903 2 003

Penguji I

Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 197111242002312100 1

Pembimbing II

Drs.Abdurrasyid,M.Ag
NIP: 19760222 199403 1 003

Penguji II

Nico Oktario Adytyas, M.A

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)
Tanggal, 11 mei 2018

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora

Dr. Nor Huda, M. Ag., M.A
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi

Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 197111242002312100 1

Skripsi yang dibuat oleh Intan Trisandi Nim 1544300012,

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Paiembang, 2018

Dosen Pembimbing I

Bety, S.Ag, M.A

NIP : 19700421 199903 2 003

Dosen Pembimbing II

Drs. Abdurrasyid, M. Ag

NIP : 19670222 199403 1 003

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Intan Trisandi

KepadaYth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

" Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Tahun 2009-2014 Di Kota Palembang"

Yang disusun oleh :

Nama	: Intan Trisandi
Nim	: 1544300012
Jurusan	: Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2018

Dosen Pembimbing I

Bety, S.Ag., M.A

NIP.197004211999032003

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Intan Trisandi

KepadaYth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

" Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Tahun 2009-2014 Di Kota Palembang"

Yang disusun oleh :

Nama	: Intan Trisandi
Nim	: 1544300012
Jurusan	: Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2018

Dosen Pembimbing II

Drs. Abdul Syid, M.Ag

NIP: 196/022 199403 1 003

Motto:

Menuntut ilmu tanpa henti dan bekerja keras

Mencari ridho Allah SWT kecuali tiada lagi

Nyawa ini

PERSEMBAHAN

Skipsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Syamsudin dan Ibu Malaratna yang telah memberikan saya do'a dan selalu memberikan dorongan yang terbaik untuk keberhasilan saya, semoga Allah SWT memberikan kalian keselamatan dunia dan akhirat.
2. Saudara laki-laki saya semoga menjadi saudara yang baik dan menjadi kebanggan keluarga kita.
3. Ponaan saya Arkan semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, kebanggaan orangtua dan semoga Allah SWT selalu menyayangi kalian semua.
4. Dosen pembimbing I: Ibu Bety, S.Ag yang telah memberikan waktu dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberi balasan dengan sebaik-baiknya balasan.
5. Dosen pembimbing II : Bapak Drs. Abdurrasyid, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini dengan sabar, teliti dan ikhlas semoga Allah SWT memberi balasan dengan sebaik-baiknya balasan.
6. Teman-teman seperjuangan di jurusan Politik Islam angkatan 2012 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya siap menanggung sanksi dari fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Palembang, 2018

Intan Trisandi

Nim. 1544300012

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang atas rahmat dan nikmat yang telah Ia berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu tahun 2009-2014 di Kota Palembang"**. Adapun skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya sangat menyadari bahwa, tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan mencapai titik penyelesaian. Oleh karena itu, melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Sirozi, MA., Ph. D
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Nor Huda, M.A
3. Yang terhormat Ketua Jurusan Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Dr. M. Syawaluddin, M.A
4. Ibu Bety, S. Ag. M.A Selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan
5. Bapak Drs. Abdurrasyid, M. Ag Selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini dengan sabar, teliti dan ikhlas semoga Allah SWT memberi balasan dengan sebaik-baik balasan

6. Seluruh Dosen-dosen dan staf karyawan fakultas Adab dan Humaniora yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih telah memberikan banyak ilmu dan membantu selama di kampus
7. Staf KPU kota Palembang dan pengurus DPD PKS Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat meneliti ditempat tersebut.
8. Sahabat seperjuanganku yang selalu memberikan motivasi dan menemani selama penelitian saya berlangsung, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segaka bantuan, motivasi, bimbingan dan do'a semoga Allah SWT membalas budi baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Robbal 'alamin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penilitian ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 2018
Penulis

Intan Trisandi
NIM. 1544300012

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan & Rumusan Masalah	
1. Batasan Masalah	11
2. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan & Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	12
E. Definisi Operasional	13
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Kerangka Teoritis	19
H. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Sumber Data	24
5. Teknik Analisis Data	24
I. Lokasi Penelitian	25

J. Sistematika Penulisan 25

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA PALEMBANG

A. Gambaran Umum Kota Palembang

1. Letak Geografis & Luas Wilyah 26
2. Keadaan Penduduk 27
3. Agama..... 28
4. Kondisi Politik 29
5. Sarana Pendidikan 29
6. Struktur Pemerintahan 30

B. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera 30
2. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang 34
3. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 35
4. Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 40
5. Piagam Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 41
6. Kegiatan Dewan Pengurus Daerah PKS Kota Palembang 42
7. Jenjang Keanggotaan PKS 42
8. Tujuan Partai Keadilan Sejahtera 46

C. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang 46

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Faktor yang mempengaruhi pasang surutnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu tahun 2009-2014 di Kota Palembang .. 48

1. Faktor Internal 48
   a. Citra PKS 48
   b. Perkaderan PKS 50
2. Faktor Eksternal 51
   a. Perilaku pemilih 51
   b. Koalisi PKS 54

B. Strategi PKS pada pemilu th. 2009-2014 di Kota Palembang 56

1. Pengokohan kader Partai 56
2. Pedekatan terhadap tokoh masyarakat 57
3. Mengenalkan dan mempopulerkan lambang partai dan caleg 58

4. Rekruitmen Politik 59
5. Sosialisasi Politik 59
6. Komunikasi Politik 60
C. Cara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertahankan Eksistensinya 62
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 64
B. Saran-saran..... 65
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah "Eksistensi Partai Keadilan Sejatera (PKS) Pada Pemilu Tahun 2009-2014 di Kota Palembang". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pasang surutnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu tahun 2009-2014, bagaimana strategi partai PKS pada pemilu tahun 2009-2014 di kota Palembang dan cara partai PKS mempertahankan eksistensinya pada pemilu tahun 2009-2014. Penelitian ini menggunakan teori partai politik menurut Miriam Budiarjo dan teori eksistensi yang dikembangkan oleh Idrus Affandi. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu cara memperoleh data melalui wawancara kemudian di analisis secara kualitatif berdasarkan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pasang surutnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu tahun 2009-2014 dilihat dari sisi internal dan eksternal yaitu dengan pengokohan kader partai, pendekatan terhadap tokoh masyarakat, mengenalkan dan mempopulerkan lambang partai dan calon anggota legislatif, rekruitmen politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik. Sedangkan upaya yang dilakukan PKS dalam mempertahankan eksistensinya yaitu PKS menyiapkan saksi-saksi PKS, dan silaturahmi dengan publik. Meningkatkan perolehan suara dan citra partai politik Islam di masyarakat, PKS diharapkan memperbaiki dan menjaga citra partai politik Islam di masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja partai dan membuktikan kepada masyarakat bahwa PKS benar-benar partai bersih, meningkatkan kualitas pemahaman para anggota atau kadernya baik dalam pembelajaran politik maupun meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi di berbagai kalangan masyarakat di kota Palembang dan PKS juga harus memberikan pendidikan politik secara maksimal kepada masyarat maupun kepada partai politik/aktor politik kota Palembang, agar kultur masyarakat yang pragmatis dan pratek money politik yang terjadi selama ini dapat dihilangkan.

Kata Kunci : Eksistensi, Partai Politik Islam, Pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, dengan pengertian bahwa negara Indonesia dikelola dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Amandemen keempat yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar (UUD 1945).[1] Di Negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolahan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa.[2]

Pada tahun 1945 yang merupakan awal kemerdekaan menjadi tonggak bagi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyannya. Negara dalam kaitan ini memberikan keabsahan dan perlindungan hukum terhadap warganya yang berbeda secara ideologi atau agama, selama mereka tidak melakukan kejahatan kemanusiaan, memecah belah keutuhan negara, merusak keamanan, dan menciderai keyakinan dan aqidah warga lainnya. Oleh karena itu, dalam suatu negara butuh partai politik, karena partai politik dalam suatu negara dapat membangun hubungan antarbangsa dan antarnegara dengan asas keadilan.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi sebagai sistem politiknya, dengan kata lain partai politik dari segala eksistensinya dapat berperan

[1] Sulastomo, *Dasar-dasar Pemilu* (Jakarta: PT. Erlangga, 2001). Cetakan Ke 2. h. 12
[2] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.405

sebagai jembatan aspirasi dan kepentingan-kepentingan rakyat, sehingga skala berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan baik.

Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu adaatau keberadaan.[3] Jadi, eksistensi tidak bisa dibantah bahwa seseorang akan selalu membuktikan keberadaan dirinya dengan pembuktian yang ingin di dapatkan, tujuannya untuk mendapatkan rasa puas dan rasa bangga akan keberadaan dirinya yang dapat berguna dan mendapat pandangan yang positif terhadap orang lain.

Menurut Inu Kencana Syafiie partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu negara.[4]

Partai politik sangat berperan penting dalam suatu negara karena sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Kedudukan dan peran partai politik adalah sangat penting bagi sebuah negara demokrasi, baik dalam penyusunan berbagai kebijakan yang demokratis maupun sebagai alat yang efektif untuk melakukan sosialisasi politik (kebijakan), rekruitmen politik serta sarana pengatur konflik, walaupun tidak seluruh fungsi ini dapat diperankan oleh partai-partai politik, karena di internal partai politik sendiri bisa terjadi konflik dan tidak mampu melaksanakan sosialisasi dan komunikasi politik dengan baik.

---

[3] Ready Sutanto, *Kamus Kata Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lazuardi Buku Utama, 2010), h. 30

[4] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Reflika Ditama, 2012), h. 78

Hal ini sangat tergantung pada kualitas dan kesadaran politik dari para pimpinan yang menggerakkan partai itu.[5]

Berbicara mengenai partai, bahwa di Indonesia sendiri dikenal beberapa tipe partai seperti partai yang berideologi agama khususnya Islam dan berideologi nasional, partai yang berasas Islam dimana asas dan ideoliginya diantaranya yaitu PKS. Kemudian partai sekuler, yang mana memisahkan antara agama dan negara atau dapat juga dikatakan partai yang berlandaskan nasionalisme atau kebangsaan seperti PDI-P, Demokrat dan lain-lain. Masing-masing partai tentu akan selalu mempertahankan eksistensinya di dalam kancah perpolitikan. [6]

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK). Partai Keadilan didirikan di Jakarta pada tanggal 20 April 2002 atau tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H. Partai Keadilan dibentuk dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an dan Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, Msc presiden Partai Keadilan (PK) sejak tanggal 20 Juli 1998. [7]

Kader Partai Keadilan Sejahtera awalnya dari kalangan mahasiswa rohis dan aktivis dakwah di kampus-kampus, yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum Studi Islam.

Seleksi dan pola rekrutmen kader PKS unik dalam perpolitikan di Indonesia, Kader PKS dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh

---

[5] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 215), h. 216

[6] Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Konsentrasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 221

[7] *Ibid*

sekelompok individu dan atau oleh *murabbi* (guru pembimbing) menggunakan metode Tarbiyah (pendidikan) berkesinambungan dan terjadwal (halaqah). PKS memakai strategi dalam merekrut kader yaitu dengan pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardhiyyah*), atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti *usrah* (keluarga), *halaqah* (kelompok studi), *liqa* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual) dan *nadwah* (seminar).

Pada awalnya Partai keadilan (PK) dalam pemilu tahun 1999 meraih 1,4 juta suara dengan mendapat 7 kursi di DPR, 26 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan 163 kursi di DPRD Kota/ Kabupaten.[8] Namun dalam meniti perjalanan waktu partai Islam ternyata lebih banyak terpinggirkan bahkan cenderung banyak mengalami konflik, ini terjadi pada tahun 1945 – 1957, di mana hubungan partai Islam dengan pemerintah kurang harmonis, serta pecahnya partai Islam Masyumi menjadi beberapa partai (Partai NU dan PSII). [9]

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencoba menghidupkan kembali prinsip kejamaahan di antara para aktivisnya sesuai dengan perintah Allah SWT dan tuntunan Rasul-Nya. Mereka berupaya saling mengenal, memahami, menolong dan hidup sepenanggungan dalam berbagai keadaan yang menyertainya. Eksperimen membangun

---

[8] Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Konsentrasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, h. 219

[9] *ibid*

komunitas jamaah dalam suatu partai politik itu diwujudkan adalah adanya struktur Dewan Syariah dalam organisasi partai yang mengontrol seluruh sepak terjang partai.[10]

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang dengan mayoritas warganya beragama Islam. Terutama di daerah Kota Palembang yang juga mayoritas penduduknya beragama Islam dan sebagiannya lagi ada juga masyarakat yang beragama non muslim, tentu dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam tersebut akan berpengaruh atau mendorong masa pemilih atau perolehan suara partai.

Dengan demikian, dalam pemilu dapat diasumsikan bahwa partai yang berasaskan Islam akan mendapat perolehan suara yang lebih unggul atau bahkan menang dibanding dengan partai yang berasas sekuler atau nasionalis. Hal ini terjadi pada pola pemilih partai Islam, pemilih partai Islam cendrung lebih menerima suatu partai yang menerima kemajemukan atau keberagaman tersebut ketimbang partai yang berdasarkan asas atau ideologi tertentu seperti Islam atau yang mengatasnamakan agama tertentu.

Seperti firman Allah dalam Surat Al-Rum Ayat 32 yang berbunyi:

مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

"Orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka" (Al-Rum : 32). [11]

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jika organisasi atau golongan tidak berdiri di atas petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Terutama Khulafaur Rasyidin

---

[10]Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Konsentrasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 222

[11] Indra Laksana, dkk, *Alqur'an Al Karim: Terjemahan Per Kata* (Bogor: Syaamil Alquran, 2007), h. 407

yang berakhlak mulia, maka jama'ah dan golongan dimana saja kita masuk di dalamnya, dan wajib kita bekerja sama dengan mereka. Adapun jama'ah yang menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kita wajib menjauhinya. Walaupun dia mengatakan jama'ah Islamiah. Yang menjadi ukuran bukan nama, akan tetapi kenyataan.

Peneliti dapat jelaskan bahwa organisasi (partai islam) dijadikan sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya, yang dimana didalam partai islam tersebut anggota-anggotanya harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka mereka golongan Islam yang benar. Adapun jama'ah yang menyelisihi jalan yang benar dan berjalan di atas jalan yang lain jama'ah itu bukan golongan Islam.

Selain surat Al –Rum ayat 32 adapun Firman Allah dalam surat Al- Hujurat ayat 13 menyatakan tentang golongan Islam yang asasnya berideologi Islam yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". " (Al-Hujurat:13).[12]

[12] Indra Laksana, dkk, *Alqur'an Al Karim: Terjemahan Per Kata*, h. 517

Dari surat Al-Hujurat ayat 13 di atas dapat dijelaskan bahwa Allah menjadikan manusia berkelompok dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal tetapi mereka harus berpegang teguh kepada prinsip ketaqwaan yang mengantarkan mereka menjadi mulia disisi Allah SWT.

Persaudaraan memang sangat indah, maka hindarilah permusuhan antarbangsa atau antarsuku. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan tentang larangan tidak boleh menghina ras, agama, suku, antargolongan lain dalam suatu partai atau organisasi. Oleh karena itu, dengan adanya partai atau organisasi Islam dapat dijadikan sebagai wadah dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Perolehan suara yang rendah disebabkan karena partai-partai Islam dapat terpecah belah dalam kekuatan-kekuatan kecil dan konflik-konflik internal di dalam partai itu sendiri. Sehingga disana masyarakat melihatnya para elit-elit partai bukan memperjuangkan aspirasi atau ideologi partai yang berasas Islam tersebut melainkan hanya memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok kecil yang menginginkan kekuasaan semata.

Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam periode 2009-2014 di daerah Kota Palembang mempunyai perbedaan yang mempengaruhi eksistensinya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2009 di kota Palembang sendiri cukup baik dengan memperoleh 5 kursi dengan nomor urut ke 8 dari 38 partai politik dengan mendapatkan 45.980 suara dari 5 dapil. Sedangkan perolehan suara partai politik Pemilu Legislatif Tahun 2014 menurun. Partai PKS tahun 2014 hanya mendapatkan 3

kursi dengan nomor urut ke 3 dari 15 partai politik dengan mendapatkan 42.965 suara dari 6 dapil pada pemilu tahun 2014.[13]

Dengan melihat Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu tahun 2009-2014 ini tentu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus terus bebenah dan belajar dari pengalaman-pengalaman agar dapat meraup suara yang signifikan dan mempertahankan eksistensinya. Jika tidak tentu kegagalan-kegagalan pada pemilu-pemilu sebelumnya akan terulang kembali. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) perlu mencari atau menyiapkan kader dan calon pemimpin yang benar-benar mampu dan kompeten, kemudian lebih mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan asas Islam sesuai Ideologinya dan lebih mempunyai niat dan tanggung jawab yang lebih dalam mewujudkan janji-janji dalam kampanye.

Menurut Ali Murtadlo dalam penelitiannya yang berjudul: transformasi PKS menuju partai inklusif, berdasarkan penelitian tersebut penyusun menspesifikasikan bahwa transformasi PKS sebagai partai yang mendapat *streotype* dari publik yang ekslusif menuju partai yang terbuka (dalam bentuk keanggotaan, jaringan kerjasama, pandangan politik, program kerja, kurikulum pengkaderan, dan pengurusan partai). Hal ini sesuai dengan Mukernas PKS di Bali tahun 2008, dan digulirkan kembali dalam Munas II PKS di Jakarta pada tahun 2010. PKS melakukan transformasi dilatarbelakangi oleh keinginan PKS untuk menghilangkan stigma eksklusif oleh sebagian masyarakat kepada dirinya.[14]

---

[13] *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di KPU Kota Palembang dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2009, Tanggal 08 Juni 2017*

[14] *Digilib.uin-suka.ac.id/6589/*

Sedangkan Menurut Sitri Kurnia Haya dalam penelitiannya yang berjudul: ideologi gerakan Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berdasarkan penelitian tersebut penyusun menspesifikasikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia lahir karena pengaruh gerakan Ikhwanul Muslimin yang memiliki semangat, kredibilitas dan ideologi yang tinggi. Dengan dasar dapat mendorong penganutnya untuk aktif dalam politik dengan unsur ibadah dan sosial yang memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik. Sehingga keadaan itulah yang dibuktikan oleh umat Islam di Indonesia masa sekarang untuk terus dan lebih eksis dalam berpartisipasi politik di Indonesia.[15] Hal ini terbukti masih adanya dukungan terhadap partai-partai Islam, yang salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meskipun dukungan yang diberikan belum optimal dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa PKS masih diharapkan dan menjadi tumpuan masyarakat Indonesia dan masyarakat Kota Palembang khususnya dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Oleh karena itu, untuk melihat perkembangan dan eksistensinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu tahun 2009-2014 di Kota Palembang, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya secara lebih lanjut dan mendetail dalam menulis skripsi dengan judul: ***"Eksistensi Partai Islam Pada Pemilu Tahun 2009- 2014 (Studi Kasus Partai Politik Islam PKS di Kota Palembang".***

[15] *http://digilib.uin-suka.ac.id/4439/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf*

B. Identifikasi Masalah

Langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti, setelah memperoleh dan menentukan topik penelitian ini adalah mengidentifikasikan permasalahan yang mengambarkan ruang lingkup bagian judul sebagai berikut:

1. *Track record* atau perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2009-2014 di Kota Palembang.
2. Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempertahankan eksistensinya pada pemilu 2009-2014 di Kota Palembang.
3. Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melakukan sosialisasi politik dan rekruitmen politik.
4. Partisipasi umat Islam di Kota Palembang dalam memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
5. Kendala PKS dalam upaya transformasi ideologi politiknya (Islam) terhadap kehidupan bangsa dan negara.
6. Faktor yang mempengaruhi pasang surutnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu tahun 2009-2014 di kota Palembang
7. Eksistensi partai Islam (PKS) pada pemilu 2009-2014 di Kota Palembang Sumatera Selatan

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Pembatasan masalah adalah usaha menetapkan masalah dalam batasan penelitian yang akan diteliti. Suatu penelitian membutuhkan pembatasan masalah dengan tujuan untuk dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar. Berdasarkan dengan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membuat pembatasan dari aspek periode tahun 2009-2014 dengan fokus yaitu pada pemilu DPRD Kota Palembang dengan objek bagian akhir masalah pokok: *Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu DPRD 2009-2014 Kota Palembang.*

2. Rumusan Masalah

Untuk kemudahan pembahasan masalah pokok tersebut, peneliti menjabarkan sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi pasang surutnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu tahun 2009-2014 di kota Palembang ?
2. Bagaimana strategi partai Islam (PKS) pada pemilu 2009-2014 di Kota Palembang Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana cara partai Islam (PKS) mempertahankan eksistensinya pada pemilu 2009-2014 di Kota Palembang Sumatera Selatan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, dan adapun yang jadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pasang surutnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu tahun 2009-2014 di kota Palembang.
b. Untuk mengetahui strategi partai Islam (PKS) pada pemilu 2009-2014 di Kota Palembang.
c. Untuk mengetahui cara partai Islam (PKS) mempertahankan eksistensinya pada pemilu 2009-2014 di Kota Palembang.

2) Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat, baik itu untuk peneliti pada khususnya dan terlebih lagi untuk masyarakat luas. Adapun penulis berharap agar peneliti ini berguna sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi yang mendalami bidang politik dan bagi dunia akademis penelitian ini dapat menambah referensi Ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan penelitian di masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

1. Bagi almamater, penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan serta menambah sumber data atau referensi tentang eksistensi partai Islam pada pemilu DPRD tahun 2009-2014, sebagai motivasi dalam meningkatkan pemahaman terhadap ilmu politik di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan masyarakat muslim pada umumnya.

2. Bagi Pembaca, harapan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi kepustakaan yang berguna bagi para pembaca dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mengalami permasalahan yang sejenis serta untuk sumbangan pemikiran dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkhususnya mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan/ Prodi Politik Islam dalam membentuk mahasiswa yang berbasis ilmu khususnya di bidang ilmu politik praktis dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kontribusi bagi perkembangan khasanah pengetahuan dan kepustakaan Islam terutama masalah perkembangan politik dan eksistensi partai Islam PKS pada pemilu DPRD tahun 2009-2014 di kota Palembang pada umumnya, memberikan solusi untuk menanggulangi dan mencegah terhadap fenomena yang sedang dihadapi masyarakat untuk lebih meningkatkan eksistensinya dalam kehidupan baik agama, pendidikan, pembangunan masyarakat, maupun dalam politik untuk kepentingan bersama secara arif dan bijaksana.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberi batasan-batasan dalam pembahasan yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan judul, baik itu oleh pembaca maupun penulis. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk memberikan definisi secara menyeluruh terkait judul penelitian ini.

Beranjak dari judul penelitian yang diusung dalam penelitian ini tentang "eksistensi partai politik Islam pada pemilu tahun 2009-2014 (studi kasus: partai politik Islam PKS di Kota Palembang)", maka perlu penulis jelaskan secara singkat mengenai apa yang dimaksud dalam judul penelitian ini.

Pertama, “Eksistensi”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksistensi adalah hal berada atau keberadaan.[16] Secara etimologi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*, dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu apa yang ada, segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu seseuatu dengan kodrat inherennya). Pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan.

Jadi, eksistensi adalah sebuah bagian dari suatu kehidupan tentang membaik atau memburuknya kehidupan seseorang yang keberadaannya sangat berpengaruh pada lingkungannya. Dalam konteks partai PKS, PKS merekrut kadernya dengan menggunakan strategi pola rekrutmen individual atau bentuk pendekatan orang per orang yang meliputi komunikasi personal secara langsung. Selain itu PKS juga mempunyai ideologi yang jelas, dengan mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan asas Islam sesuai Ideologinya dan lebih mempunyai niat dan tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat. Namun karena mereka partai Islam, jelas sangat rentan memanipulasi umat demi kepentingannya sendiri, kiprahnya dalam permasalahan umat tidak berpihak kepada umat, tapi berpihak kepada penguasa.

Kedua, “ Partai Islam” Istilah partai Islam dari tinjauan bahasa menurut Al-Khalil ibn Ahmad yang dikutip oleh Muqoddam Cholil partai Islam merupakan suatu kelompok yang mempunyai keinginan, tujuan dan mempunyai cita-cita dan amal

[16] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 288

perbuatan yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam dalam seluruh aspek kegiatan-kegiatannya mulai dari pengambilan nama, logo, asas, visi, misi dan tujuannya.[17]

Partai Islam adalah partai yang berasaskan Islam yang dipimpin oleh tokoh umat Islam dan memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dan mencoba menghidupkan kembali prinsip kejamaahan di antara para aktivisnya sesuai dengan perintah Allah SWT dan tuntunan Rasul-Nya dengan berupaya saling mengenal, memahami, menolong dan hidup sepenanggungan dalam berbagai keadaan yang menyertainya.

Ketiga, "Pemilihan Umum", pemilihan umum yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi parlemen. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokratis, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Walaupun setiap warga negara Indonesia (laki-laki dan wanita) mempunyai hak untuk memilih, namun UU Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. [18] Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum :

1. Sudah genap berumur 17 tahun.

2. Belum mencapai usia 17 tahun, akan tetapi sudah menikah.

Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik

[17] *http://www.alhikmah.ac.id/soft/Artikel/Kontemporer/partaiislam.pdf*
[18] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Politik Indonesia*. (Bandung: Reflika Aditama, 2012), h. 98

terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Pemilihan umum dilakukan secara rahasia. Rahasia yang dimaksud ialah para pemilih dijamin oleh peraturan, bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun, siapa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada suara-suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.[19]

Pemilihan umum diadakan secara bebas. Maksudnya bahwa tiap-tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan maupun paksaan dari siapa pun atau apa pun juga.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan unsur penting dalam skripsi, karena berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti diantara penelitian yang pernah dilakukan penelitian lain dengan maksud untuk menghindari tidak terjadinya duplikasi (plagiasi) penelitian. Karena itu, peneliti harus mencari tahu berbagai penelitian atau tulisan terdahulu, baik skripsi, tesis, disertasi, maupun buku teks dan artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti dengan cara menghimpunnya dan membacanya kemudian menuliskannya dengan menyebut judul, masalah, fokus bahasannya, dan termasuk teori yang digunakan. [20]

Sepanjang pengetahuan penulis, setelah melihat beberapa referensi di perpustakaan saat ini belum ditemukannya suatu karya skripsi khusus yang membahas

---

[19] *Ibid*

[20] Teori Penyusunan , *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora,* (Palembang:Fakultas Adab dan Humaniora, 2016) , h. 21

masalah Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu DPRD 2009-2014 Kota Palembang Maka, di bawah ini penyusun menyajikan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, diantaranya adalahsebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Bustomi NIM: 1111045200006 (2015), Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *"Kekuatan Partai Politik Islam di Daerah Mayoritas Muslim dalam perolehan Suara pada pemilu 2014 (Studi Kasus: Kab. Pandeglang)"* Berdasarkan penelitian tersebut penyusun menspesifikasikan terhadap kekuatan partai Islam sehingga partai Islam tetap kuat untuk mempertahankan eksistensinya di suatu daerah. Adapun hasil penelitiannya yaitu kekuatan-kekuatan partai politik Islam di kabupaten Pandeglang sangat berpengaruh dalam perolehan suara pada pemilu 2014.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dawud NIM: 1110045200018 (2014), Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *"Pengaruh pengurus Partai Keadilan Sejahtera untuk meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Muslim terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus: Kec. Kebumen tahun pada pemilu 2014)"* Berdasarkan penelitian tersebut penyusun menspesifikasikan bahwa tingkat kepuasan dan preferensi pilihan masyarakat muslim terhadap partai islam rendah (14%) dan belum mampu mengalahkan keunggulan dari kepercayaan masyarakat muslim terhadap partai politik berbasis masa Islam (23%) dan di luar keduanya (41%) yang disebabkan karena partai politik Islam belum mampu mewakili aspirasi masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Wira Rikho Sandhi NIM: 090565201064 (2014), Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, yang berjudul "*Politik Identitas Partai Islam (Studi Partai Keadilan Sejahtera)"* Berdasarkan penelitian tersebut penyusun menspesifikasikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bderkeyakang inan dan ingin menegaskan bahwa secara internal-subyektif aktifitas politik adalah ibadah, apabila bertujuan untuk kemaslahatan umat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridho Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai amal shalih, adapun sistem perkaderan yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera (PKS) adalah tarbiyah yang tujuannya adalah membentuk kader menjadi islam yang berorientasi terhadap menebarkan dakwah tentang ke-Esa-an allah sehingga kader nantinya mampu menjalani amanah dakwah beserta tantangannya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Miftahuddin NIM:102033224774(2008,)Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta,yang berjudul"*Pengaruh* ideology ikhwanul muslimin terhadap partai keadilan sejahtera(pks)diindonesis"berdasarkan penelitian tersebut penyusun menjelaskan proses pengaruh ideologi ikhwanul muslimin terhadap partai pks terjadi melalui proses transfer pemikiran yang dibawa oleh para sarjana-sarjana dari timur tengah tahun 1980-an yang membentuk gerakan yang dikenal dengan istilah" tarbiyah".

Dari beberapa peneliti di atas, peneliti lebih cenderung membahas partai Islam secara meyeluruh dengan menjadikan beberapa partai yang berbasis Islam sebagai subjek penelitiannya, tidak hanya itu peneliti tersebut juga membandingkan perolehan

suara beberapa partai Islam dengan partai nasionalis yang ada di suatu daerah yang bermayoritas muslim dan menitikberatkan pembahasan pada intern PKS secara menyeluruh baik sistem politik maupun sistem pengkaderan.

Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah lebih menspesifikasikan terhadap Eksistensi Partai Politik Islam dari Pemilu 2009-2014 (Studi Kasus: Partai Politik Islam PKS) di Kota Palembang Sumatera Selatan. Dengan demikian penelitian ini layak dan menarik untuk dilakukan karena dimana masyarakat di Indonesia terkhusus di Kota Palembang bermayoritas Muslim, meskipun dukungan yang diberikan belum optimal dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang bermayoritas muslim.

Namun partai PKS masih diharapkan dan menjadi tumpuan masyarakat Indonesia dan masyarakat Kota Palembang khususnya dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Oleh karena itu penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk di bahas lebih lanjut.

G. Kerangka Teoritis

Bagian ini merupakan unsur yang paling penting didalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, untuk membahas permasalahan seputar eksistensi partai keadilan sejahtera (PKS) pada pemilu tahun 2009-2014 di Kota Palembang, penyusun menggunakan teori partai politik yang dikembangkan oleh Miriam Budiardjo dan teori pemilu yang dikembangkan oleh Ramlan Surbakti.

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita- cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.[21]

Partai politik sederhananya dapat diartikan sebuah kumpulan orang-orang yang memiliki kesepakatan bersama dalam memperjuangkan cita-cita. Partai politik adalah kendaraan atau sarana yang digunakan untuk dapat berkompetisi dalam ranah demokrasi bernama pemilu.

Ramlan Surbakti (1992:181) mengartikan pemilu sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai, tetapi penulis menetapkan pengertian pemilu sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Teori partai politik dan Pemilu ini digunakan pada penelitian yang berjudul Eksistensi Partai Islam pada Pemilu 2009 dengan studi kasus Partai Keadilan Sejahtera, karena relevan dengan subjek dan objek penelitian tersebut. Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan salah satu partai politik yang menjadi subjek penelitian dan pemilu adalah ranah kompetisi untuk mengukur eksistensi sebuah partai Islam yang merupakan objek dari penelitian ini.

---

[21] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 403

Eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita (partai). Eksistensi ini perlu "diberikan" orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan atau kita diakui. Masalah keperluan akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena ini merupakan pembuktian akan hasil kerja atau performa di dalam suatu lingkungan.[22]

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan sesuatu dalam kehidupan baik benda atau manusia menyangkut apa yang dialami. Dalam penelitian ini, eksistensi yang dimaksud yaitu tentang keberadaan partai politik Islam PKS terhadap naik turunnya suara pada pemilu tahun 2009-2014.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh permecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan ungkapan lain, metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian. Metode penelitian memandu peneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal penelitian sampai akhir suatu penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini peneliti mengggunaka metode penelitiannya yaitu sebagai berikut:

[22] Ready Sutanto, *Kamus Kata Baku Bahasa Indonesia*, h.30

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan wawancara secara langsung dan bertatap muka dengan orang atau lembaga yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan historis-sosiologis yaitu penyelidikan terhadap sejarah sekaligus kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi selama eksistensi partai PKS pada pemilu tahun 2009-2014 di Kota Palembang. selain itu, penyusun juga mencoba mengungkapkan segala gejala-gejala sosial, insitusi-insitusi sosial yang terjadi selama eksistensi partai PKS pada pemilu tahun 2009-2014 di Kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha atau cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun penelitian dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Lapangan *(Observasi)*

Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya peninjauan atau mengamati secara cermat. Secara umum observasi berarti pangamatan, penglihatan.[23] Observasi ini juga diartikan sebagai pengamatan dengan fenomena-fenomena dengan mengamati langsung terhadap objeknya. Dengan melakukan observasi ini, peneliti gunakan untuk memperoleh data secara umum situasi dan kondisi

[23] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 854

yang ada di kota Palembang. Dengan melakukan observasi ini, peneliti gunakan untuk memperoleh data secara umum situasi dan kondisi yang ada di Kota Palembang.

b. Wawancara *(interview)*

Teknik *Interview* yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara)..[24] Berdasarkan masalah-masalah yang memerlukan solusi alternatif atas realitas yang terjadi. Dalam hal ini peneliti akan berusaha mencari informen yang bisa di wawancarai, diantaranya adalah 3-5 kader partai PKS Kota Palembang yang dapat mewakili kader-kader lainnya.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah *"semi structured".* Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang di peroleh bisa meliput semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui peningkatan tetulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik Dokumentasi adalah mencari mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, notulen rapat, foto, gambar, grafik, katalog, majalah dan sebagainya.[25]

---

[24] Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 24

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* h.133

Peneliti menggali data mengenai eksistensi partai politik Islam pada pemilu tahun 2009-2014 (Studi kasus partai politik Islam di Kota Palembang).

4. Sumber Data

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti membagi data menjadi dua komponen yakni data primer dan data sekunder:

a. Data Primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya melalui wawancara langsung ke narasumber (*responden*). Yang menjadi narasumber adalah kader-kader partai PKS di Kota Palembang, serta melalui arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah terhadap eksistensi partai PKS Kota Palembang.
b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, literatur, Jurnal koran, majalah, dan internet yang dianggap relevan dengan penelitian ini.[26]

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data ini dikenal juga dengan istilah *literature study* yang lazim dilakukan dalam penelitian kepustakaan. Kegunaannya adalah untuk memperoleh pemahaman secara lebih tajam dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti.[27] Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklarifikasikan, dianalisis dan interprestasikan secara mendetail, teliti dan cermat agar memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* , h.138
[27] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 191

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

I. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jl. Letnal Murod Km. 5 Palembang, Sumatera Selatan.

J. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan yang akan di bahas dalam skripsi ini Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan ini, maka penulis menjelaskan dalam sistematika penulisan secara garis besar yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, meteode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN. Bab ini tentang letak geografis, keadaan penduduk, keagamaan, pendidikan, struktur pemerintah, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini memaparkan tentang analisis data dan pembahasan dari analisis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi lapangan.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG

A. Gambaran Umum Kota Palembang

1. Letak Geografi

Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara Kabupaten Banyuasin (berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin), di sebelah timur Kabupaten Banyuasin (berbatasan dengan Balai Makmur Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin), di sebelah barat Kabupaten Banyuasin (berbatasan dengan Desa Kecamatan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin), sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim (berbatasan dengan Desa Bakung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim).

Berdasarkan kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi 2 bagian besar yaitu daerah Seberang Ulu dan daerah Seberang Ilir terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. *Sungai Musi* adalah sungai terbesar dengan panjang 15 km, kedalaman 8-12 meter dengan lebar berkisar rata–rata 313-504 meter, *Sungai Komering* dengan lebar 236 meter, *Sungai Ogan* dengan lebar rata-rata 211 meter dan *Sungai Keramasan* dengan lebar rata-rata 103 meter.[28]

[28]Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang), h. 4-6.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang periode 31 Desember 2014 sebanyak 1.736.551 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 882.216 jiwa dan perempuan sebanyak 854.335 jiwa, menurun 43.955 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1.780.506 jiwa dibandingkan pada tahun sebelumnya Tahun 2013, dengan laju pertumbuhan penduduk di Tahun 2014 sebesar 4,3%.[29]

Terhadap jumlah penduduk tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kota Palembang masih bertumpu di Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Sukarami. Tingginya penduduk di tiga kecamatan ini karena dikecamatan tersebut merupakan sentra industri dan sentra pendidikan serta dipengaruhi perbatasan dengan kabupaten lain atau daerah pinggiran kota, rincian jumlah penduduk Kota Palembang per kecamatan tahun 2014 yaitu Ilir Barat 73.612, Seberang Ulu I 190.670, Seberang Ulu II 105.918, Ilir Barat I 149.759, Ilir Timur I 79.095, Ilir Timur II 189.576, Sukarami 168.715, Sako 102.465, Kemuning 92.591, Kalidoni 124.553, Bukit Kecil 49.369, Gandus 69.467, Kertapati 98.718, Plaju 96.596, Alang-Alang Lebar 102.576, Sematang Borang 42.871. jadi dapat dilihat jumlah penduduk kota palembang pada tahun 2014 sebanyak 1.736.551 jiwa.[30]

---

[29]Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang), h. 9.

[30]Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang), h. 10.

3. Agama

TABEL PEMELUK AGAMA DI KOTA PALEMBANG

SUMATERA SELATAN

No	Agama	%	Jumlah
1	Islam	93,08%	1.585.178
2	Protestan	1,97%	1.2614,5
3	Katolik	1,16%	1.755,95
4	Hindu	0,05%	75,7
5	Budha	3,41%	5.161,9
6	Kong Hu Cu	0,04%	60,5
7	Dan Lain-Lain	0,28%	423,85

Jumlah keseluruhan penduduk kota Palembang mayoritas memeluk agama islam berjumlah 1.585.175 jiwa dan beragama lain 151.375 jadi total jiwa 1.736.551 jiwa.

Penduduk kota Palembang mayoritas memeluk agama islam. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik kota Palembang tahun 2014 yang beragama Islam berjumlah 1.585.176 jiwa dan beragama lain 151.375 jiwa. Islam (93,08%), Protestan (1,97%), Katolik (1,16%), Hindu (0,05%), Budha (3,41%), Kong Hu Cu (0,04%), dan lain-lain (0,28%).[31]

4. Kondisi politik

Kondisi politik kota Palembang dan meningkatnya teknologi yang canggih saat ini, sehingga masyarakat kota Palembang sendiri tak canggung lagi dengan fenomena-fenomena yang berkembang, baik itu fenomena politik religion, nasional, bahkan

[31]Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang tahun 2014, diakses pada 11 Desember 2017, pukul: 19.36 WIB

intarnasional. Perkembangan partai politik dikota Palembang sudah mengikuti pemilu ditingkat nasional dan terdapat 12 partai politik yang ikut pemilu legislatif khususnya di kota palembang. Pengetahuan politik dikota Palembang cukup berkembang pesat dengan dukungan sarana trasportasi dan komunikasi.

5. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan bidang yang akan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pelaksanaan program-program di bidang pendidikan semakin berkembang di berbagai jenis dan jenjang ditunjang dengan sarana pendidikan yang lengkap. Sarana pendidikan seperti jumlah sekolah di Kota Palembang baik negeri maupun swasta pada Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak 1.588 sarana pendidikan yang terdiri dari:

1) Sebanyak 665 Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palembang.
2) Sebanyak 402 Sekolah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Kota Palembang.
3) Sebanyak 258 Sekolah Menegah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kota Palembang.
4) Sebanyak 133 Sekolah Menegah Umum/Madrasah Aliyah (SMU/MA) di Kota Palembang.
5) Sebanyak 68 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Palembang.
6) Sebanyak 62 Perguruan Tinggi/Universitas.[32]

[32]Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang), h. 13.

6. Struktur Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan, wilayah administrasi Kota Palembang mengalami perubahan jumlah kecamatan dan kelurahan yang menjadi 16 kecamatan dan 107 kelurahan.[33]

Pemerintahan kota terdiri atas pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota. Pemerintah kota terdiri atas walikota dan perangkatnya. Perangkat daerah kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

B. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera lahir dari gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul diawal 1980-an diera Orde Baru.gerakan ini dibawa oleh para alumni pemuda Indonesia yang belajar di penguruan tinggi agama Islam di Timur Tengah yang merupakan hasil dari interaksi mereka dengan ideologi Ikhwatnul muslimin di Mesir yang di dirikan oleh Hasan Al-Banna[34]

---

[33]Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang), h. 17-18.

[34] Febrian Taufiq Sholeh, "Manhaj Tarbiyah dalam Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ", *Jurnal Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang* Vol.18 No.1 (Juli 2015), h.61

Tokoh-tokoh pelopor gerakan ikhwatul muslimin di Indonesia yaitu hilmi Amiduddin, Salif Segaf Al-jufri, Abdullah Said Baharmus, dan Asep Abdul syukur. Gerakan tarbiyah sendiri mengambil basis gerakannya dimasjid-masjid Universitas di Indonesia. Tokoh yang mempolopori gerakan tarbiyah dikampus dan merupahkan tokoh dari DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) yaitu Ir. Imamuddin Abdul Rahim yang memprakarsai pola perkaderan model ikhwatul muslimin yang dikenal dengan usrah/halagah/liqo`at.liqoan ini berawal dari masjid salman ITB (Institut Teknologi Bandung) yang kemudian menyebar ke Universistas lainnya.[35] Pada Era Orde baru, gerakan Tarbiyah bisa di pahami sebagai alternatif dari berbagai gerakan Islam saat itu, bahwa penguasa Orde Baru melakukan represi (hambatan) terhadap aktivitas umat Islam dalam bidang politik. Bubarnya Masyumi tahun 1970 merupahkan bukti bahwa rezim Orde Baru tidak mengizinkan Islam secara politik tampil ke publik yang berpotensi menjadi lawan pemerintah. kemudian diterapkannya Asas Tunggal Pancasila sebagai landasan dari semua organisasi yang saat itu,yang mengakibatkan sebagai dari umat Islam mengalami penindasan dan tekan politik yang kuat.[36]

Jatuhnya rezim Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto dan beralih ke Era Reformasi,dengan menguatnya tuntutan rakyat yang menghendaki perubahan disegala bidang kehidupan terutama kehidupan politik yang mensyaratkan kebebasan rakyat untuk mendapatkan hak politiknya yang selama ini telah terkerdilkan oleh kekuasaan otoriter pemerintahan Orde Baru. Maka, membuka peluang bagi gerakan Tarbiyah untuk memperjuangkan dan mengekspresikan idealisme dan cita-cita gerakan mereka

[35] Rangga Eka Saputra, : *Dinamika Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*," Skripsi (Jakarta: FISIP, UIN SH,2014), h.38

[36] *Ibid*

keruang politik.hal ini dibuktikan dengan munculnya partai baru yaitu Partai Keadilan (PK).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta 20 April 2002 dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK).[37] Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh

[37]Zuly Qodir. *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 221.

proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26–29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiringterpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai Pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16-20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.[38]

Pendukung utama Partai Keadilan Sejahtera sebagian besar dari kalangan aktivis dakwah yang selama ini berkecimpung dalam dunia dakwah kampus dan sekolah dengan keunikannya tersendiri berupa kombinasi kaum muda, Islam, terdidik sehingga menjadi suatu kemewahan bagi partai dakwah ini. Sayap politik Partai Keadilan Sejahtera yaitu KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) sebagai sayap muda partai ini. Gerakan Tariyah menjadi pengajarannya. dengan Sayyid Qutb dan

[38] *http://sumsel.pks.id/profil/sejarah-ringkas/, di akses pada 7 Februari 2017*

Yusuf Qordhowi yang menjadi penutannya. Partai Keadilan Sejahtera juga mendirikan lembaga dakwah kampus sebagai sumber rekrutmen kader.[39]

Menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Partai ini adalah salah satu partai yang menggunakan asas Islam sebagai asas partainya dan partai yang menyatahkan dirinya sebagai partai dakwah serta di kenal juga sebagai partai kader yang mempunyai militansi dan loyalitas kader yang kuat.untuk pengurus PKS ditingkat daerah kabbupaten/kota disebut DPD (Dewan Pengurus Daerah) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang berlokasi di jalan letnan murot kecamatan ilir timur 1 km.5 Palembang, Sumatera Selatan kota Palembang yaitu sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi umat Islam khususnya dan seluruh masyarakat di kota Palembang. Adapun ketua umum DPD PKS kota Palembang saat ini adalah M. Ridwan Saiman,SH.MH.

2. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palembang

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai Islam yang masih eksis di Indonesia khususnya di kota Palembang saat ini. perkembangan Partai Keadilan Sejahtera secara umum merupakan partai lanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang lahir pada Era Reformasi tahun 1998. Pada tanggal 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk dewan dan para kadernya. Partai ini adalah salah satu partai yang menggunakan asas Islam

[39] Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, h.226

sebagai asas partainya dan partai yang menyatakan dirinya Partai Dakwah serta dikenal juga sebagai partai kader yang mempunyai militansi dan loyalitas kader yang kuat.

Untuk pengurus PKS di tingkat daerah Kabupaten/kota disebut DPD (Dewan Pengurus Daerah). Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang, Sumatera Selatan. Terbentuknya Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang yaitu sebagai wadah untuk menampung aspirasi umat Islam khususnya dan seluruh masyarakat di kota Palembang. Adapun Ketua Umum DPD PKS kota Palembang saat ini adalah M. Ridwan Saiman, SH,MH.[40]

3. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Visi Partai Keadilan Sejahtera adalah "Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat". Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keIslaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah akan berjuang secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya Masyarakat Madani dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan mempercepat realisasi target PK Sejahtera dari "partai kader" menjadi "partai kader

[40] M. Ridwan Saiman, (Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawancara*, 21 November 2017

berbasis massa yang kokoh", agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur.

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (ifrath dan tafrith).[41]

Islam memandang nilai keadilan dan HAM melekat dengan penciptaan manusia. Keadilan adalah nilai yang bersifat intrinsik, baik dalam struktur ataupun perilaku manusia. Tuhan Yang Mahakuasa menciptakan manusia dalam keadaan adil dan seimbang. Semenetara itu, Islam ditegaskan sebagai agama fitrah kemanusiaan. Situasi-situasi psikis dan sosiologis manusia, sesuai dengan fitrahnya, memerlukan nilai-nilai keadilan.[42]

Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah, yakni keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan (tawazun) hidup yang merupakan buah

---

[41]Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera, 2008). h. 1.

[42] *http://sumsel.pks.id/profil/sejarah-ringkas/, di akses pada tanggal 7 Februari 2017.*

dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad).

Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujud dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain.[43]

Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:

1) Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta

[43]Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera, 2008). h. 1

penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerahyang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.[44]

2) Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan dayasaing industri nasional dengan pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan

[44]Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani.* h. 2.

tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.[45]

3) Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya-saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental-spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan relijius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan berkreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan yang kontinue.[46]

[45]Ibid, h. 3.
[46]Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Mada ni.* h. 4.

4. Lambang Partai Keadilan Sejahtera

Makna yang terkandung dari lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut :

a. Kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah.
b. Bulan sabit melambangkan kejayaan, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
c. Untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istiqamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegak dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
d. Putih melambangkan bersih, suci dan mulia.
e. Hitam melambangkan kepastian, aspiratif, dan akomodatif.
f. Kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan dan kejayaan.
g. PKS dengan warna hitam, singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera.[47]

[47] Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. Bab 1 Pasal 2. h. 18.

5. Piagam Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera

Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menetukan dalam waktu lebih dari lima dekade ini dengansebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga abad, Indenesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agutus 1945.

Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktaktorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulah bersemi pada Orde Lama.

Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depa dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat. Reformasi Nasional pada hakikatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditmpuh selama berabad-abad.

Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya. Partai tersebut bernama Partai Keadilan Sejahtera. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan

inayah-Nya kepada kita, mengikatkan hati diantara para pengikut agama-Nya dan mendorong perjuangan mereka dimanapun mereka berada. Amin.[48]

6. Kegiatan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang

Partai Keadilan Sejahtera memiliki kegiatan ruti setiap 2 kali dalam 1 minngu yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Adapun berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera, diantaranya: melakukan pengajian di Majelis Ta'lim maupun aktifis kampus, kemudian melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pembinaan masyarakat yang berbentuk kuliner. Karena kader-kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera ini banyak yang memiliki kemampuan di bidang usaha dagang pempek, tempe, susu kedelei dan lain-lain.

Partai Keadilan Sejahtera tidak hanya semata-mata mengajarkan politi saja melainkan diajarkan bagaimana cara membangun perekonomian keluarga. Pada tanggal 23 Maret 2017 di Hotel Aston Palembang, Partai Keadilan Sejahtera mengadakan perkumpulan para pengusaha kader-kader PKS se-Indonesia. Mereka berkumpul berdasarkan kemampuan di bidangnya masing-masing. Para kader yang sudah mempunyai usaha, mereka berusaha membantu kader-kader lain yang inginmembuka peluang bisnis.[49]

7. Jenjang Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader, dimana inti dari kekuatan partai ini berasal dari para kader-kadernya. Sesuai dengan AD-ART PKS Bab IV pasal 9 yaitu, setiap warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan republik Indonesia yang berlaku. Sistem kaderisasi pada PKS

[48] *http://sumsel.pks.id/profil/piagam-deklarasi/diaksespada 22 Desember 2017. pukul 12.45 WIB*
[49]M. Ridwan Saiman, (Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawancara*, 21 November 2017

berjenjang sesuai dengan tingkat kualitas dan loyalitas kadernya, adapun tingkatannya adalah :

a. Anggota kader pendukung/terbina, yang terdiri :
    1) Kader Pemula, yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.
    2) Kader Muda, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar pertama.
b. Anggota kader inti, yang terdiri :
    1) Kader Madya, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPD dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar kedua.
    2) Kader Dewasa, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
    3) Kader Ahli, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
    4) Kader Purna, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPP dan telah lulus pada pelatihan Kepartaian tingkat ahli.

c. Kader Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Jenjang keanggotaan kader ini merupakan jenjang kaderisasi para anggota Partai Keadilan Sejahtera. Jika telah memenuhi kualitas dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka jenjang keanggotaannya pun dapat ditingkatkan.[50]

Jenis-jenis pelatihan kepartaian, sebagai sarana pengkaderan partai di Partai Keadilan Sejahtera:

Training Orientasi Partai (TOP) 1 yaitu para calon anggota partai diberikan pemahaman awal mengenai struktur kepartaian, sejarah serta eksistensi sepanjang perjalanan PKS. Setelah mengikuti TOP 1 ini, anggota partai secara resmi menyandang status sebagai *anggota pemula terdaftar*, yang juga dapat segera memiliki kartu anggota partai. Dalam tahap selanjutnya, seorang yang telah lulus dalam TOP 1 ini akan dibina dalam forum yang lebih intim lagi, yakni melalui Taklim Rutin Partai (TRP) yang formatnya merupakan pengajian rutin, serta pendalaman materi-materi keIslaman yang kelak dipimpin oleh seorang *murabbi*.

Training Orientasi Partai (TOP) 2 yaitu seorang anggota pemula terdaftar yang telah cukup mumpuni dan layak bagi *murabbi* akan direkomendasikanuntuk mengikuti jenjang pengkaderan selanjutnya. Peserta yang telah melalui jenjang pengkaderan TOP 2 ini berhak menyandang status sebagai *anggota pemula terbina* yang memiliki kewajiban untuk mengikuti beberapa serangkaian kegiatan tambahan partai, yakni Taklim Rutin Kader (TRK), Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK), serta Kegiatan Internal Partai (KIA).

[50]Melihat Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab IV Pasal 9, h. 3-4

Training Dasar (TD) 1, dan TD 2. Prasyarat untuk dapat menjalankan TD 1, seorang anggota pemula harus telah mendapatkan sebuah keterangan berupa Surat Kelulusan Anggota Pemula/Kartu Tanda Anggota Pemula (SKAP/KTAP). Bagi anggota pemula yang dinyatakan lulus dalam TD 1, maka statusnya berubah menjadi seorang *anggota muda*. Kegiatan anggota muda lainnya, selain TRK, PPK, dan KIA, yakni mengikuti Kajian Ilmu Sosial Politik 1 (KISP 1).

Setelah dinyatakan cukup kompeten oleh *murabbi* untuk menjalani jenjang pengkaderan berikutnya, yakni TD 2. Maka seorang anggota muda akan kembali direkomendasikan sang *murabbi* untuk menjalani TD 2. Lulusan dari TD 2 ini akan menyandang predikat *anggota madya*.

Training Lanjutan (TL) 1 yaitu seorang anggota madya yang telah lulus dalam TL 1 berhak mendapatkan status baru, yakni sebagai *anggota dewasa*. Setelah dinyatakan lulus dan menyandang gelar anggota dewasa, maka alur pengkaderan selanjutnya yakni menjalani Training Lanjutan (TL) 2. Seorang yang tengah, dan telah dinyatakan lulus dari TL 2 ini akan memperoleh gelar sebagai *anggota ahli*.

Selanjutnya alur pengkaderan tertinggi di PKS, adalah Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS). TMKS dapat diikuti oleh seorang anggota ahli yang hendak menaikan jenjang keanggotaannya di PKS menjadi seorang anggota purna. Selain anggota purna yang merupakan jenjang pengkaderan tertinggi di PKS, ada juga status anggota kehormatan yang dapat diperoleh tanpa melalui proses kaderisasi. Anggota kehormatan ini dapat disematkan oleh pengurus partai kepada seorang kader

yang dirasa telah memiliki sumbangsih besar, serta figur ketokohannya yang dianggap dapat dijadikan panutan dalam tubuh internal partai.[51]

8. Tujuan Partai Keadilan Sejahtera

Tujuan didirikannya PK Sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PK Sejahtera pasal 5, yaitu:

1. Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana maksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridlai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[52]

C. Struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dari kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang, jumlah kader PKS kota palembang lebih kurang 2413 kader Yang terdiri dari 707 laki-laki dan 1706 perempuan. Jumlah seluruh Kepengurus Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang pada periode 2010-2015yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan terbagi menjadi 8 bidang yaitu bidang kaderisasi, bidang pengembangan keumatan, bidang kepanduan dan olahraga, bidang generasi muda dan profesi, bidang perempuan, bidang pengembangan ekonomi kewirausahaan, bidang kelembagaan sosial, bidang kebijakan publik.[53]

---

[51]Linggar Kharisma Suseno, "Pola Afiliasi Informal Organisasi Gerakan Mahasiswa Dengan Partai Politik", *artikel*Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas FISIP, Universitas Diponegoro, h. 12-15, diakses pada 24 Februari 2017, pukul : 11.54 WIB

[52]Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera, 2008). h. 28.

[53] Darusalam, (Kader DPD PKS Kota Palembang), *Wawancara*, 15 Desember 2017.

Ada sebanyak 121 pengurus Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang pada periode 2010-2015, diantaranya anggota pengurus Majelis Pertimbangan Daerah yang berjumlah 6 orang, pengurus Dewan Syariah Daerah yang berjumlah 7 orang, dan Dewan Pengurus Daerah berjumlah 109 orang dan 7 biro dan 12 bidang di Partai Keadilan Sejahtera dan 16 DPC sudah terbentuk dengan baik sementara struktur DPR belum terbentuk. [54]

[54]M. Ridwan Saiman, SH,MH (Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera) *Wawancara, 26 Desember 2017*

BAB III

EKSISTENSI PARTAI ISLAM PADA PEMILU TAHUN 2009-2014

STUDI KASUS PARTAI POLITIK ISLAM PKS DI KOTA PALEMBANG

Pada bab ini , penulis akan menguraikan hasil penelitian berupa data-data yang ditemukan secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi dari dokumen atau catatan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Hasil analisis data-data inilah yang nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta dapat menarik kesimpulan dari hasi analisis yang diperoleh.

A. Faktor yang Mempengaruhi Pasang Surutnya Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Tahun 2009-2014

Penjelasan faktor yang mempengaruhi pasang surutnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam hal ini peneliti melihat bahwa ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi pasang surutnya perolehan suara PKS pada Pemilu tahun 2009-2014 yaitu dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang muncul dari partai itu sendiri (pengurus partai)

a. Citra Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampil sebagai partai yang membawa citra partai dakwah, partai ini kemudian dianggap sebagai entitas kekuatan baru yang mewarnai perpolitikan negeri ini. Dan masyarakat pun mulai menggantungkan harapannya ke pundak PKS untuk mengusung perubahan yang selama ini tidak pernah tercapai. Dengan berbagai slogan-slogan kampanye yang mengusung tentang partai baru yang bersih dari KKN, partai yang berisikan orang-orang yang kuat ilmu dalam agama

dan salih dalam beribadah, mereka bergerak dilingkungan masjid-masjid dan kampus-kampus, karena pada umumnya, para kader PKS memang sebagian besar adalah aktifis-aktifis dakwah di kampus-kampus dan tokoh-tokoh yang sering mengisi pengajian rutin pada berbagai majelis ta'lim dan kelompok-kelompok pengajian masyarakat.[55]

Terkait dengan partai politik, dalam kegiatan tarbiyah, diberikan materi saluran politik yang bertujuan agar peserta tarbiyah dapat mengetahui hak-hak sosialnya dalam dunia politik, membandingkan beberapa saluran politik untuk melihat kelebihan, kesamaan, dan kekurangannya dengan objektif, memilih saluran politik dengan benar yang sesuai dengan aspirasinya, dan terlibat aktif untuk menyalurkan ide-idenya dalam memperbaiki masyarakat pada saluran politik yang dipilihnya.[56]

Sesuai wawancara dengan Yulfa bahwa:

"Sayap-sayap politik PKS sebagai partai dakwah yang melebarkan sayap-sayap politiknya ke organisasi maupun lembaga-lembaga dakwah kampus, sekolah dan majelis." [57]

Pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa pendukung eksternal PKS ada pada sayap-sayap politiknya yaitu organisasi, lembaga-lembaga dakwah kampus, sekolah dan majelis. Hal ini diperkuat dalam buku Zuli Qodir yang menyatakan bahwa pendukung utama PKS sebagai besar dari kalangan aktivis dakwah yang selama ini berkecimpung dalam dunia dakwah kampus, sekolah yang terdiri dari kombinasi kaum muda Islam terdidik.

---

[55] Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2001), h. 67-69

[56] Ibid

[57] Yulfa Cindo Sari, (Wakil Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawacara*, 23 Maret 2017

b. Perkaderan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sebagai partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader, PKS memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infra struktur kelembagaan yang tersebar dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia partai.

Hal ini dapat dibuktikan ketika PKS mengadakan aksi sejuta umat, sebuah aksi demonstrasi yang mengagumkan. Unjuk rasa yang bukan hanya diikuti oleh orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja bahkan terdapat juga ibu-ibu yang menggendong anaknya atau mendorong kereta bayinya. Keberanian mereka berdemonstrasi sambil membawa bayinya, di antara ratusan ribu orang di Bundaran Hotel Indonesia, jelas menunjukkan tingginya jaminan dan kepercayaan bahwa unjuk rasa itu akan berlangsung tertib dan damai.[58]

Sesuai dengan wawancara dengan Ridwan Saiman yang ditemui peneliti di Hotel Azza Palembang, yang menyatakan bahwa :

"*Kekuatan PKS Kota Palembang pada saat pemilu, PKS memiliki solidaritas kader yang sangat tinggi karena kader PKS mempunyai keunikan tersendiri dalam sistem kaderisasi dan pembinaan yang dilakukan tiap pekan terhadap kader-kadernya."*[59]

Dengan demikian, PKS merupakan satu-satunya partai kader di Indonesia khususnya di Kota Palembang, yang akan menjadikan kekuatan inti PKS dalam

[58] Ibid
[59] M. Ridwan Saiman, (Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawancara*, 21 November 2017

menghadapi setiap pemilu yaitu royalitas dan militansi kader PKS yang tidak perlu diragukan lagi. Semua kader bergerak untuk memperjuangkan partainya, karena PKS merupakan yang tidak pernah berhenti bergerak, kader-kadernya selalu melakukan kegiatan setiap pekan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang keluar dari partai.

a. Perilaku pemilih

Perilaku pemilih adalah tindakan seseorang dalam memberikan suara atau memilih pemimpin pada saat pemilu. Berdasarkan hasil perolehan KPU Kota Palembang, bahwa pada pemilu 2009 PKS mendapatkan suara sebesar 8.206.955 suara atau 7,88%, dan menempatkan partai ini diurutan ketiga dari daftar perolehan suara terbanyak partai politik pada pemilu 2009 ini. Dan dari jumlah suara ini, PKS menempatkan 59 orang wakilnya di Legislatif di Indonesia, sedangkan di Kota Palembang itu sendiri mendapat suara sebesar 45,980.[60] Sebagaimana dilihat dari data perolehan suara KPU Kota Palembang yang didapat oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

TABEL
DAFTAR PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG[61]

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARPOL PER DAPIL					JUMLAH
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	DAPIL V	
1	Partai Hati Nurani Rakyat	5,366	7,845	4,389	5,986	7,222	30,808
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1,683	3,588	3,108	2,733	1,346	12,458
3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	609	1,915	171	881	603	4,179
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	5,399	3,740	886	2,699	1,041	13,765
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	9,761	9,129	3,256	4,795	6,429	33,370

[60] Data Perolehan Suara KPU Kota Palembang, 09 Mei 2017
[61]Data diperoleh dari, KPU kota Palembang, pada tanggal 09 Mei 2017.

6	Partai Barisan Nasional	2,685	2,901	485	1,078	4,974	12,123
7	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	754	1,173	2,360	2,833	1,008	8,128
8	Partai Keadilan Sejahtera	10,738	13,533	5,584	5,585	10,540	45,980
9	Partai Amanat Nasional	5,771	3,532	5,670	2,314	4,104	21,391
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	343	1,002	131	424	338	2,238
11	Partai Kedaulatan	1,677	2,472	202	515	642	5,508
12	Partai Persatuan Daerah	-	-	-	-	-	-
13	Partai Kebangkitan Bangsa	3,356	6,991	2,512	3,999	1,483	18,341
14	Partai Pemuda Indonesia	486	359	104	179	546	1,674
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	444	831	2,075	127	227	3,704
16	Partai Demokrasi Pembaruan	827	3,261	535	1,370	1,303	7,296
17	Partai Karya Perjuangan	1,244	858	1,418	1,353	3,327	8,200
18	Partai Matahari Bangsa	963	1,067	1,390	799	493	4,712
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1,884	947	139	455	1,730	5,155
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1,530	2,269	647	1,765	3,030	9,241
21	Partai Republika Nusantara	605	1,199	374	1,910	1,204	5,292
22	Partai Pelopor	229	254	396	589	371	1,839
23	Partai Golongan Karya	18,691	22,256	7,727	15,357	10,097	74,128
24	Partai Persatuan Pembangunan	3,651	5,124	3,146	6,563	5,193	23,677
25	Partai Damai Sejahtera	3,286	3,488	339	292	900	8,305
26	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	695	1,280	1,120	358	1,382	4,835
27	Partai Bulan Bintang	2,243	1,816	353	3,464	1,994	9,870
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24,992	17,136	9,384	12,113	15,345	78,970
29	Partai Bintang Reformasi	3,088	2,017	2,412	3,088	5,434	16,039
30	Partai Patriot	571	423	3,095	1,260	584	5,933
31	Partai Demokrat	31,917	30,914	11,541	17,956	23,851	116,179
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	370	342	111	84	692	1,599
33	Partai Indonesia Sejahtera	728	984	297	791	564	3,364
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	644	3,698	157	2,100	3,657	10,256
35	Partai Merdeka	522	852	199	351	1,057	2,981
36	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	901	272	30	824	526	2,553
37	Partai Sarikat Islam Indonesia	364	850	2,641	438	1,345	5,638
38	Partai Buruh	221	152	60	101	260	794
JUMLAH		149,238	160,470	78,444	107,529	124,842	620,523

Berdasarkan paparan di atas, kita dapat katakan bahwa pada Pemilu 2009 yang lalu, adalah merupakan awal kebangkitan pemilih rasional dalam menentukan pilihannya, dimana rakyat sebagai penentu kemenangan politik. Dengan demikian, bagi partai-partai politik yang tidak mempunyai tokoh dan atau kader yang berkualitas dan bisa dibanggakan, bagi partai politik yang tidak mampu menunjukkan karakternya yang

jelas dalam mengusung program-program atau isu riil yang langsung dirasakan masyarakat, serta bagi partai politik yang tidak mampu mengelola efektifitas organisasi dan melaksanakan proses regenerasi dengan pengkaderan yang baik, maka cepat atau lambat partai-partai politik tersebut akan ditinggalkan oleh pemilih yang umumnya rasional dan pendukung fanatiknya lama-lama akan tergerus mengikuti arus kuat yang terjadi.

TABEL
DAFTAR DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PALEMBANG

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Kursi	Perolehan suara Parpol Per Dapil						Jumlah
			Dapil 1	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V	Dapil VI	
1	NasDem	5	11.639	9.809	4.333	14.392	14.337	9.851	64.359
2	PKB	5	10.721	5.577	10.070	11.591	9.512	10.376	57.847
3	PKS	3	9. 009	7.321	7.736	4.802	9.468	4.989	42.965
4	PDI-Perjuangan	9	27. 058	20.830	8.247	16. 098	27.784	20.183	120.200
5	Golkar	6	14.200	7.602	8.252	11.937	13.497	10.296	65.784
6	Gerindra	5	15.896	12.417	8.242	10.992	13.870	17.770	79.187
7	Demokrat	7	17.784	16.377	8.432	13.961	25.376	10.060	91.900
8	PAN	3	8.348	6.790	8.102	14.126	10.330	5.490	53.186
9	PPP	2	5.234	6.343	7.673	11.433	6.415	7.698	44.796
10	Hanura	3	10.493	6.349	9. 002	7.614	5.889	7.247	46.594
11	PBB	2	7.488	7.826	10.776	6.274	4.510	3.931	40.805
12	PKPI	-	1.686	3.237	1.095	133.63	1.357	2.254	12.992
Jumlah		50	139.556	110.476	91.600	126.583	142.345	110.145	720.705

(Sumber: KPU Tingkat Kota Palembang)

Berdasarkan hasil perolehan suara sah partai politik diatas,jika diurutkan dari besarnya perolehan suara yang dicapai oleh masing-masing partai yaitu PDI-P (120.200)suara, partai Demokrat (91.990)suara,partai Gerindra (79.187)suara,PAN (53.186)suara, partai Hanura (46.594)suara, PPP (44.796)suara, PKS (42.965)suara, PBB (40.805)suara, PKPI (12.992) suara. Untuk**PKS** sendiri,berdasarkan dapil perolehan suara **PKS** terbanyak terdapat di dapil 5(9.458)suara dan paling sedikit terdapat di dapil 4 (4.802) suara.

Dari hasil perolehan suara tahun 2009-2014 terjadi pasang surut yang dimana dari kedua tabel diatas Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera dalam 5 tahun periode 2009-2014 di daerah kota Palembang dapat dilihat perbedaanya sangat jauh. Pada pemilu di tahun 2009, ada 38 partai pesaing dan **PKS** menduduki posisi ke 4 dari 12 partai yang lolos duduk di DPRD kota Palembang. Berbeda dengan pemilu legislatif 2014 PKS menduduki posisi ke 10 dari 12 partai pesaing Koalisi PKS Kota Palembang.

b. Koalisi PKS

Pada era pemerintahan SBY Jilid kedua (2009-2014), walau perolehan suara jauh di bawah Golkar tetapi PKS memperoleh jatah empat kursi menteri. Dalam perjalanannya PKS beberapa kali, melalui parlemen mengambil sikap berseberangan dengan barisan koalisi. Mulai dari kasus angket Century. kasus angket mafia pajak, interpelasi moratorium remisi dan pembebasan bersyarat koruptor, hingga voting kenaikan BBM.[62]

Dalam sidang voting kenaikan BBM pada 30-31 Maret 2012, partai yang memilih BBM naik 6 bulan kedepan diantaranya: Golkar, Demokrat, PPP, PAN dan PKB. Sedangkan partai yang menolak kenaikan BBM cuma PKS dan Gerindra. Namun ada juga partai yang *walk out*, tidak memberi suara dalam voting: PDIP dan Hanura. Sayangnya opsi yang disahkan ialah: pasal 7 ayat 6a, yang berarti pemerintah akan menaikan BBM dalam waktu 6 bulan kedepan. Ketika terus bermanuver dan

[62] Syamsuddin Ch. Haesy, *Parpol Khuntsa dalam harian Jurnal Nasional, 0*6 juli 2013, h 10

mengambil sikap berseberangan, PKS dicap bermuka dua, partai khuntsa, partai bunglon dan layak masuk rekor dunia.[63]

Karena menjadi satu satunya partai yang ikut koalisi, tetapi bertingkah layaknya partai oposisi. Sanksipun menimpa PKS, saat mengumumkan perombakan KIB II di Istana Kepresidenan, SBY akhirnya mencopot salah satu kader PKS, Suharna Surapranata dari kursi Menristek.[64] Seperti yang diungkapkan oleh Tim Advokasi DPD PKS Kota Palembang :

"Pada tahun 2013 malapetaka terjadi pada partai PKS karena presiden PKS pada saat itu terseret dalam kasus kuota impor daging bersama rekannya. Oleh kerana kasus tersebut dapat mengancam eksistensi dari partai PKS dan kemungkinannya masyarakat atau pemilih PKS dapat menurun pada pemilu 2014 nanti. Dan memang benar pada pemilu tahun 2014 perolehan suara pemilu PKS menurun".[65]

Dari pernyataan diatas, dijelaskan bahwa koalisi partai PKS tahun 2009-2014 bermanuver dan mengambil sikap berseberangan. Oleh karena itu, dapat memperengaruhi eksistensi partai PKS dicap sebagai partai yang bermuka dua dan bertingkah layaknya partai oposisi.

---

[63]Majalah Tempo:*Talak Tiga Setelah Minyak* , edisi 9 April 2012; Majalah Detik, *PKS Belum Tamat* , edisi 9-15 April 2012

[64] *Ibid*

[65] Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS Kota Palembang, *Wawancara,* 23 Maret 2017

B. Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilu Tahun 2009-2014 Di Kota Palembang Sumatera Selatan

1. Pengokohan Kader Partai

Program ini bertujuan meningkatkan militansi melalui program pengokohan kader dengan peningkatan ruhiyah/maknawiyah dan memperkuat fikriyah. Dengan adanya pengokohan kader ini dirasakan adanya kader-kader yang memiliki wawasan dan semangat baru, serta para kader lebih mencintai partainya sendiri. Dengan adanya pengokohan kader ini mereka diharapkan lebih tekun dan giat melaksanakan tugas-tugasnya sehingga masyarakat memahami dan merespon yang baik tentang PKS.[66]

Sebagai partai pengokohan kader, adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ridwan Saiman yang ditemui Hotel Azza Palembang yang menyatakan bahwa: sebagai pengokohan kader PKS tahun 2009-2014, kader-kader PKS melakukan sistem pengkaderan ada dalan bentuk kegiatan mendidik masyarakat, diberdayakan atau dibina dan diberi pemahaman tentang ilmu-ilmu agama.[67]

Pengokohan kader yang dilakukan PKS tahun 2009-2014 ini tidak selamanya dilakukan pada waktu menghadapi pemilihan umum saja tetapi dilakukan pada waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seperti pada waktu menghadapi kongres dan menghadapi kegiatan yang lainnya. Pengokohan kader ini biasanya dilakukan oleh pengurus cabang, sedangkan pengurus ranting melaporkan jumlah kader yang akan ikut dalam pengokohan kader tersebut.

---

[66] Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Organisasi*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1998), h. 72

[67] M. Ridwan Saiman, (Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawancara*, 21 November 2017

2. Pendekatan Terhadap Tokoh Masyarakat

Pendekatan terhadap tokoh masyarakat yang dilakukan oleh partai PKS yang dilakukan dua kali dalam seminggu, pendekatan terhadap tokoh masyarakat dilakukan dengan bersilaturahmi mendekati semua tokoh masyarakat setempat terutama kepada para tokoh yang memiliki pengaruh besar dan melakukan kesepakatan sosial dan politik dengan kelompok kepentingan yang memiliki anggota dan pengaruh yang luas di masyarakat. [68]

Pendekatan terhadap tokoh masyarakat yang dilakukan oleh partai PKS diutamakan pada tokoh-tokoh dari berbagai etnis. PKS bersifat terbuka untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, profesi, jenis kelamin, dan agama. Pendekatan terhadap tokoh masyarakat dari berbagai etnis, dilakukan untuk menjalin komunikasi politik dengan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki potensi untuk menentukan pilihanya pada PKS dalam Pemilu 2009.

Dari hasil pengamatan di lapangan serta wawancara yang dilakukan penulis dengan Yulpa Cindo Sari sebagai Wakil Ketua PKS Kota Palembang yang menyatakan bahwa: “Salah satu yang dirasa paling efektif adalah dengan metode pendekatan langsung kepada masyarakat, untuk itu PKS Kota Palembang menurunkan kader-kader ke seluruh pelosok untuk bersosialisasi dengan masyarakat karena untuk bersilaturahmi langsung dengan masyarakat”. [69]

---

[68] Adman Nursal, *Politikal Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 54-56

[69] Yulfa Cindo Sari, (Wakil Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawacara*, 23 Maret 2017

Pendekatan terhadap tokoh masyarakat yang dilakukan oleh PKS Kota Palembang dalam pelaksanaan Pemilu 2009-2014 perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, pendekatan terhadap tokoh masyarakat yang dilakukan bukan untuk kepentingan sesaat dan hanya untuk sementara waktu, tetapi diupayakan agar dapat memiliki kepentingan untuk waktu jangka panjang atau Pemilu yang akan datang.

3. Mengenalkan dan Mempopulerkan Lambang Partai dan Caleg

Mengenalkan dan mempopulerkan lambang partai dan Caleg (calon anggota legislatif) menjadi bagian dari upaya yang dilakukan oleh DPD PKS/Caleg PKS di Kota Palembang untuk memperoleh dukungan dan perolehan suara pada masa Pemilu 2009-2014. Hal ini dilakukan melalui pemasangan spanduk, pembagian stiker, kartu nama, pemasangan baliho, dan lain-lain. Namun kenyataan, upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan dana dan finansial dari masing-masing calon anggota legislatif PKS sehingga wajar jika kemudian perolehan suara dan kursi PKS pada Pemilu 2009 tidak maksimal.[70]

Tanggapan informan terhadap popularitas keberadaan DPD PKS/Caleg PKS Kota Palembang pada Pemilu 2009-2014 menyatakan bahwa maksimalnya perolehan suara dan dukungan masyarakat terhadap PKS pada Pemilu 2009-2014 disebabkan karena banyak dari masyarakat yang hanya mengenal PKS, tetapi kurang mengenal Caleg yang diusung oleh partai tersebut.

[70] M. Ridwan Saiman, (Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawancara*, 21 November 2017

4. Rekruitmen Politik

Rekruitmen merupakan langkah awal untuk memperoleh dukungan dan perolehan suara pada masa Pemilu. Rekruitmen yang dilakukan oleh PKS Kota Palembnag melalui Trainning Orientasi Partai (TOP), pengajian rutin mingguan (liqa), silaturahim ke sesama kader dan simpatisan dan lain-lain. Akan tetapi kegiatan dalam upaya rekruitman dan pembinaan kader tersebut hanya diikuti sesama kader dan belum dapat diikuti oleh seluruh simpatisan dan masyarakat. Kader yang direkrut oleh PKS harus melalui beberapa tahapan- tahapan yang harus dilalui oleh kader seperti kader pemula, kader muda, kader madya, kader dewasa, kader ahli, kader purna, dan kader kehormatan.[71]

Rekrutmen/pembinaan simpatisan sudah maksimal. Di dalam acara orientasi partai sangat banyak simpatisan dan partisipan yang ingin bergabung dengan PKS, tetapi kader partai tidak dapat memberikan pembinaan atau tidak siap dalam hal pembinaan untuk dijadikan kader mula dikarenakan keterbatasan SDM dan dana. Hal inilah yang menyebabkan kurang maksimalnya pembinaan simpatisan/partisipan.

5. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan strategi yang dilakukan oleh PKS dalam memasyarakatkan tujuan politik mereka untuk menarik simpatisan masyarakat sehingga masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat bergabung, memilih dan menjadi bagian dari kepengurusan partai PKS. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPD Kota Palembang untuk meningkatkan jumlah kader, simpatisan dan partisipan partai.

[71] Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab IV Pasal 9, h. 3-4

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ridwan Saiman bahwa sosialisasi politik bahwa bagi PKS apabila kader yang tidak ikut pembinaan, alamat mereka akan menyimpang dari khittah perjuangan partai. Yang menjadi pilar-pilar dan dasar perjuangan partai itu sendiri adalah ideologi Islam, karena bagi PKS dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dan kemaslahatan umat.[72]

Sosialisasi politik pada pelaksanaan Pemilu 2009-2014 terus dilakukan dengan melakukan kampanye politik dan penyampaian tujuan partai PKS Kota Palembang. Sosialisasi politik yang dilakukan PKS Kota Palembang belum menunjukkan hasil yang lebih baik. Perlu juga diadakan perbaikan-perbaikan demi peningkatan jumlah perolehan suara dalam pemilu yang akan datang.

6. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh PKS untuk menyampaikan pesan-pesan politik mereka kepada masyarakat pemilih sehingga masyarakat pemilih memahami tentang program-program politik dan tujuan dari PKS serta mampu menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat. Komunikasi politik yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Palembang adalah dengan menyampaikan pesan-pesan politik dari partai kepada kader, simpatisan, dan partisipan partai yang diteruskan kepada masyarakat pemilih.

Komunikasi politik yang dilakukan PKS Kota Palembang diantaranya dengan cara mengumpulkan seluruh fungsionaris kader serta pengurus dari setiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Palembang pertemuan ini bertujuan untuk

[72] M. Ridwan Saiman, (Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawancara*, 21 November 2017

menyampaikan pesan-pesan politik dari DPD PKS Kota Palembang agar semua fungsionaris dan kader partai lebih memantapkan pendekatanya kepada masyarakat pemilih serta menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat. Komunikasi ini diutamakan untuk menggalang kekuatan yang ada terutama melakukan pendekatan kepada masyarakat[73].

Dari hasil temuan dan pengamatan di lapangan serta wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber dapat diketahui tanggapan mereka dimana komunikasi politik yang dilakukan PKS Kota Palembang selama ini dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu tahun 2009-2014 di Kota Palembang yaitu menjaga nilai-nilai partai agar terciptanya kader-kader yang berkualitas dan lebih mengedepankan kader dalam setiap bursa pencalonan anggota legislatif maupun eksekutif, dengan mengusung orang atau tokoh yang memiliki kualitas, elektabilitas, dan kekuatan masa untuk berseteru dalam proses pemilu dengan atas nama partai PKS. Langkah ini merupakan salah satu strategi partai demi menjaga sistem kaderisasi partai tetap berjalan. Sehingga pertimbangannya menang dan kalah tetap mengedepankan kader.[74]

Strategi yang dilakukan PKS Kota Palembang pada pemilu 2009-2014 yaitu melalui dua cara. Pertama, penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat baik melalui kader secara individu maupun lembaga-lembaga

[73] Yulfa Cindo Sari, (Wakil Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawacara*, 23 Maret 2017

[74] Muhammad Anwar Alsada (Ketua PKS Kota Palembang tahun 2009-2014), *Wawancara*, 12Desember 2017

kemasyarakatan dan yayasan/ormas lainnya. Kedua, penyebaran kader ke dalam lembaga pemerintahan dan lainnya.

C. Cara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Mempertahankan Eksistensinya pada Pemilu tahun 2009-2014

Cara Partai PKS dalam mempertahankan eksistensinya untuk mendidik masyarakat agar tidak berorientasi pada materi, sebab salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik dengan baik kepada masyarakat agar praktek politik uang dapat dihilangkan. Tidak hanya itu upaya partai PKS dalam mempertahankan eksistensinya yaitu menyadarkan masyarakat untuk melek politik.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ridwan Saiman yang dimana beliau menyatakan bahwa:

> *"Upaya yang dilakukan PKS kedepan adalah menyadarakan masyarakat untuk melek politik yang masih suka politik uang dan mungkin sebagian partai ada yang menggunakan hal seperti itu tetapi tidak semua partai yang melakukannya. Oleh karena itu dalam mempertahankan eksistensinya partai PKS melakukakan pendidikan politik terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat melek politik."* [75]

Dari wawancara diatas, dapat dianalisa dalam mempertahankan eksistensinya partai PKS untuk kedepan adalah dengan menyadarakan masyarakat dengan memberikan pendidikan politik agar masyarakat berpikir rasional. Perilaku politik yang ada dimasyarakat kota Palembang sendiri sudah cukup cenderung rasional, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak juga sebagian masyarakat yang masih bersifat pragmatis. Tidak semua masyarakat menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan melihat program-program yang ditawarkan partai kepada masyarakat melainkan lebih

[75] M. Ridwan Saiman, (Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawancara*, 21 November 2017

memilih segi materinya yaitu sebarapa besar partai memberikan mereka uang maupun sembako dan lain-lain.

Kemudian penyataan dari Aulia Rahman yang menyatakan bahwa:

"*Upaya yang dilakukan PKS kedepan adalah PKS melakukan pengkaderan dengan kriteria dalam memilih caleg dilihat dari jenjang kader, jaringan atau relasi yang dimiliki, basis konsistuennya (maksudnya seperti ini karena kita partai Islam apakah kader ini mempunyai binaan-binaan dimajelis ta'lim atau Forum Keagamaan lainnya, biasanya para CAD ada seperti itu) dan besarnya dukungan dari keluarga".* [76]

Upaya yang dilakukan oleh PKS dalam mempertahankan eksistensinya yaitu PKS berupaya mencermati undang-undang pemilu yang akan datang, mencari dana sumbernya dari sumbangan/ infaq para kader-kader kemudian dana dari anggota dewan yang telah duduk di DPRD fraksi PKS yang biasanya setiap anggota menyetor 1,5 juta perbulan kepada partai PKS, menyiapkan saksi-saksi PKS, dan silaturahmi dengan publik. Jadi inilah upaya-upaya PKS untuk mempertahankan eksistensi politiknya diranah publik. Strategi politik seperti ini, sebenarnya diterapkan juga oleh setiap partai politik di Indonesia. Memperkuat eksistensi suatu partai politik merupakan hal alamiah. Jika program kerja partai politik bagus tetapi kader tidak mempunyai daya tarik serta berpengaruh, maka program kerja partai politik akan sia-sia.

[76] Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS Kota Palembang, *Wawancara,* 23 Maret 2017

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk mengakhiri penyusunan skripsi ini, berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan dari lapangan kemudian dianalisis, maka eksisitensi partai islam pada pemilu tahun 2009-2014 studi kasus partai politik islam PKS di kota Palembang, dapat peneliti simpulkan:

Pertama, faktor yang mempengaruhi pasang surutnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam hal ini peneliti melihat bahwa ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi pasang surutnya perolehan suara PKS pada Pemilu tahun 2009-2014 yaitu dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal.

a. Faktor internal dipengaruhi oleh: Citra Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Perkaderan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
b. Faktor eksternal dipengaruhi oleh: Perilaku pemilih dan Koalisi PKS

Kedua, strategi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu tahun 2009-2014 di Kota Palembang yaitu tetap menjaga nilai-nilai partai agar terciptanya kader-kader yang berkualitas dan lebih mengedepankan kader dalam setiap bursa pencalonan anggota legislatif maupun eksekutif, dan mengusung orang atau tokoh yang memiliki kualitas, elektabilitas, dan kekuatan masa untuk berseteru dalam proses pemilu. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Palembang 2014- Sekarang Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Palembang 2014- Sekarang

Ketiga, Upaya yang dilakukan oleh PKS dalam mempertahankan eksistensinya yaitu PKS berupaya mencermati undang-undang pemilu yang akan datang untuk dipatuhi, mencari dana, menyiapkan saksi-saksi PKS, dan silaturahmi dengan publik.

B. SARAN

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan,maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, untuk mengembalikan eksistensi dan meningkatkan perolehan suara dan citra partai politik Islam di masyarakat, PKS diharapkan memperbaiki dan menjaga citra partai politik Islam di masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja partai dan membuktikan kepada masyarakat bahwa PKS benar-benar partai bersih

Kedua, sebagai partai kader, PKS kota palembang harus meningkatkan kualitas pemahaman para anggota atau kadernya baik dalam pembelajaran politik maupun meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi di berbagai kalangan masyarakat di kota Palembang.

Ketiga, sebaiknya PKS juga harus memberikan pendidikan politik secara maksimal kepada masyarat maupun kepada partai politik/aktor politik kota Palembang, agar kultur masyarakat yang pragmatis dan pratek money politik yang terjadi selama ini dapat dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adman Nursal, *Politikal Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. Bab 1 Pasal 2

Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia,* (Jakarta: Teraju, 2001)

Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang tahun 2014, diakses pada 11 Desember 2017, pukul: 19.36 WIB

Data diperoleh dari, KPU kota Palembang, pada tanggal 09 Mei 2017

Darusalam, (Kader DPD PKS Kota Palembang), *Wawancara*, 15 Desember 2017

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)

Digilib.uin-suka.ac.id/6589/

Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011)

Febrian Taufiq Sholeh, "Manhaj Tarbiyah dalam Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ", *Jurnal Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang* Vol.18 No.1 (Juli 2015)

http://www.alhikmah.ac.id/soft/Artikel/Kontemporer/partaiislam.pdf

http://digilib.uin-suka.ac.id/4439/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

http://digilib.unila.ac.id/280/12/BAB%20III.pdf

http://sumsel.pks.id/profil/sejarah-ringkas/, di akses pada 7 Februari 2017
http://sumsel.pks.id/profil/sejarah-ringkas/, di akses pada tanggal 7 Februari 2017

http://sumsel.pks.id/profil/piagam-deklarasi/diaksespada 22 Desember 2017. pukul 12.45 WIB

Indra Laksana, dkk, *Alqur'an Al Karim: Terjemahan Per Kata* (Bogor: Syaamil Alquran, 2007)

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Reflika Ditama, 2012)

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014.(Palembang:Pemerintahan Kota Palembang)

Linggar Kharisma Suseno, "Pola Afiliasi Informal Organisasi Gerakan Mahasiswa Dengan Partai Politik", *artikel*Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas FISIP, Universitas Diponegoro, h. 12-15, diakses pada 24 Februari 2017, pukul : 11.54 WIB

M. Ridwan Saiman, (Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawancara*, 21 November 2017

Majalah Tempo:*Talak Tiga Setelah Minyak* , edisi 9 April 2012; Majalah Detik, *PKS Belum Tamat* , edisi 9-15 April 2012

Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani,* (Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera, 2008)

Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Muhammad Anwar Alsada (Ketua PKS Kota Palembang tahun 2009-2014), *Wawancara*, 12 Desember 2017

Rangga Eka Saputra, : *Dinamika Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*," Skripsi (Jakarta: FISIP, UIN SH,2014)

Ready Sutanto, *Kamus Kata Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lazuardi Buku Utama, 2010)

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di KPU Kota Palembang dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2009, Tanggal 08 Juni 2017

Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 215)

Sulastomo, *Dasar-dasar Pemilu* (Jakarta: PT. Erlangga, 2001). Cetakan Ke 2

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Organisasi*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1998

Syamsuddin Ch. Haesy, *Parpol Khuntsa dalam harian Jurnal Nasional, 0*6 juli 2013

Teori Penyusunan, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, (Palembang:Fakultas Adab dan Humaniora, 2016)

Yulfa Cindo Sari, (Wakil Ketua DPD PKS Kota Palembang), *Wawacara*, 23 Maret 2017

Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Konsentrasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)

PEDOMAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Wawancara ini ditunjukan untuk data dalam rangka penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul *"Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Tahun 2009-2014 di Kota Palembang"*

Besar harapan kami kepada bapak/ibu memberikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas partisipasinya di ucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana *Track Record* atau perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2009-2014 di Kota Palembang ?
2. Bagaimana eksistensi partai PKS pada pemilu 2009-2014 Kota Palembang ?
3. Bagaimana peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat dalam hal pengokohan kader ?
4. Bagaimana respon masyarakat dalam mengikuti sosialisasi politik yang dilakukan oleh kader politik PKS Kota Palembang ?, dan siapa yang menjadi pendukung utama PKS ?
5. Ada berapa pengurus PKS kota Palembang pada periode 2009-2014 ?
6. Bagaimana peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melakukan Komunikasi politik ?
7. Adakah kendala PKS dalam menghadapi pemilu tahun 2009-2014 ?
8. Apa faktor yang mempengaruhi pasang surutnya suara pemilu 2009-2014 ?
9. Bagaimana strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempertahankan eksistensinya di pemilu tahun 2009-2014 dan apa saja upaya-upayanya ?
10. Berapa hasil perolehan suara PKS pada pemilu tahun 2009-2014 di Kota Palembang ?
11. Pada Pemilu 2009-2014 Partai PKS mendapat suara dan menduduki pringkat keberapa ?

DAFTAR JAWABAN

1. M. Ridwan Saiman, SH, MH

1) *Pertanyaan* : Bagaimana peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada masyarakat dalam hal pengokohan kader ?

   Jawaban : Peran PKS terhadap masyarakat yaitu sebagai wadah untuk menampung aspirasi umat Islam khususnya di masyarakat Kota Palembang, tidak hanya itu PKS juga mengajarkan tentang bagaimana cara membangun perekonomian keluarga. Kader- kader PKS juga melakukan sistem pengkaderan ada dalam bentuk kegiatan mendidik masyarakat, diberdayakan atau dibina dan diberi pemahaman tentang ilmu-ilmu agama.

2) *Pertanyaan*: Ada berapa pengurus PKS kota Palembang pada periode 2009-2014 ?

   Jawaban: ada sebanyak 121 pengurus PKS kota Palembang periode 2009-2014, diantaranya anggota pengurus majelis pertimbangan daerah yang berjumlah 6 orang, pengurus dewan syariah daerah yang berjumlah 7 orang, dan dewan pengurus daerah berjumlah 109 orang dan 7 biro dan 12 bidang di partai PKS dan 16 DPC sudah terbentuk dengan baik sementara struktur DPR belum terbentuk.

3) *Pertanyaan* : Bagaimana eksistensi partai PKS pada pemilu 2009-2014 Kota Palembang ?

   Jawaban : eksistensi PKS pada saat pemilu tahun 2009-2014 PKS memiliki solidaritas kader yang sangat tinggi karena kader PKS memiliki keunikan

tersendiri dalam sistem kaderisasi dan pembinaan yang dilakukan tiap pekan terhadap kader-kadernya.

4) *Pertanyaan* : Adakah kendala PKS dalam menghadapi pemilu tahun 2009-2014 ?

   Jawaban : ada, hal ini dilakukan melalui pemasangan spaduk, pembagian stiker, kartu nama, pemasangan baliho, dan lain-lain. Namun, kenyataan upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan dana dan finansial dari masing-masing calin anggota legislatif PKS sehingga wajar jika kemudian perolehan suara dan kursi PKS pada pemilu 2009 tidak terlalu maksimal.

5) *Pertanyaan* : Bagaimana respon masyarakat dalam mengikuti sosialisasi politik yang dilakukan oleh kader politik PKS Kota Palembang ?, dan siapa yang menjadi pendukung utama PKS ?

   Jawaban : respon masyarakat dalam mengikuti sosialisasi politik yang dilakukan oleh PKS sangat baik, karena sosialisasi politik kepada masyarakat mengenalkan bahwa pilar-pilar dasar perjuangan partai itu sendiri adalah ideologi Islam, karena PKS menjadikan Islam sebagai Aqidah, asas dan basis moral, untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dan kemaslahatan umat

6) *Pertanyaan:* Bagaimana strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempertahankan eksistensinya di pemilu tahun 2009-2014 dan apa saja upaya-upayanya ?

   Jawaban : Upaya yang dilakukan PKS kedepan adalah menyadarakan masyarakat untuk melek politik yang masih suka politik uang dan mungkin

sebagian partai ada yang menggunakan hal seperti itu tetapi tidak semua partai yang melakukannya.

2. Yulfa Cindosari, A. Md

1). *Pertanyaan:* Siapa yang menjadi pendukung utama PKS pada pemilu 2009-2014?

Jawaban : sebagai partai dakwah yang menyebarkan sayap-sayap politiknya maka pendukung utama PKS adalah organisasi maupun lembaga-lembaga dakwah kampus, sekolah dan majelis pada pemilu 2009-2014.

2). *Pertanyaan:* Bagaimana eksistensi partai PKS pada pemilu 2009-2014 Kota Palembang ?

Jawaban : Eksistensi partai PKS pada pemilu 2009-2014 Kota Palembang dengan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, untuk itu PKS menurunkan kader-kader keseluruh pelosok untuk bersosialisasi dengan masyarakat karena untuk bersilaturahmi dengan masyarakat.

3). Pertanyaan : Bagaimana peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melakukan komunikasi politik ?

Jawaban : Masyarakat memilih dan memahami program politik dengan tujuan PKS mampu menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat.

3. Aulia Rahman, SH. MH

1). *Pertanyaan* : Apa faktor yang mempengaruhi pasang surutnya suara pemilu 2009-2014 ?

Jawaban : pada tahun 2013 malapetaka terjadi pada partai PKS karena presiden PKS pada saat itu terseret dalam kasus kuota impor daging bersama rekannya. Oleh kerana kasus tersebut dapat mengancam eksistensi dari partai PKS dan kemungkinannya masyarakat atau pemilih PKS dapat menurun pada pemilu 2014 nanti. Dan memang benar pada pemilu tahun 2014 perolehan suara pemilu PKS menurun.

2) *Pertanyaan :* Bagaimana strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempertahankan eksistensinya di pemilu tahun 2009-2014 dan apa saja upaya-upayanya ?

Jawaban: Upaya yang dilakukan PKS kedepan adalah PKS melakukan pengkaderan dengan kriteria dalam memilih caleg dilihat dari jenjang kader, jaringan atau relasi yang dimiliki, basis konsistuennya (maksudnya seperti ini karena kita partai Islam apakah kader ini mempunyai binaan-binaan dimajelis ta'lim atau Forum Keagamaan lainnya, biasanya para CAD ada seperti itu) dan besarnya dukungan dari keluarga.

4. Darussalam. SH

1) Pertanyaan : Ada berapa pengurus PKS kota Palembang pada periode 2009-2014 ?

Jawaban : Jumlah kader PKS kota palembang lebih kurang 2413 kader Yang terdiri dari 707 laki-laki dan 1706 perempuan. Jumlah seluruh Kepengurus Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang pada periode 2010-2015yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan terbagi menjadi 8 bidang yaitu bidang kaderisasi, bidang pengembangan keumatan, bidang kepanduan

dan olahraga, bidang generasi muda dan profesi, bidang perempuan, bidang pengembangan ekonomi kewirausahaan, bidang kelembagaan sosial, bidang kebijakan publik.

2). *Pertanyaan* : Apa faktor yang mempengaruhi pasang surutnya suara pemilu 2009-2014 ?

Jaawaban : kurangnya figur tokoh didalam tubuh partai sedikt banyak sering menjadi penyebab akselerasi manuever kegiatan partai dan sosialisasi belum dirasakan terlihat dari hasil survei kita, hanya 11% responden yang menyatakan kedekatannya terhadap PKS.

5. Siska, S.H . M.H

1). *Pertanyaan* : Berapa hasil perolehan suara PKS pada pemilu tahun 2009-2014 di Kota Palembang ?

Jawaban : pemilu 2009 di Indonesia PKS mendapat suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,88% dan mendapatkan partai diurutkan ketiga dari daftar perolehan suara terbanyak partai politik pada pemilu 2009. Dan di Kota Palembang PKS sendiri mendapat suara sebesar 45.980. Sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Palembang PKS mendapat perolehan suara sebanyak 42.965.

2). *Pertanyaan* : Pada Pemilu 2009-2014 Partai PKS mendapat suara dan menduduki peringkat keberapa ?

Jawaban : PKS mendapatkan suara yang signifikan dan menduduki pengkat ke 4 dari 38 partai politik pesaing. Sedangkan pada pemilu legislatif di Kota Palembang tahun 2014 mendapat peringkat ke 10 dari 12 partai pesaing.

POTO-POTO LAMPIRAN

GAMBAR 1

WAWANCARA DENGAN BAPAK M. RIDWAN SAIMAN, SH, MH

GAMBAR 2

WAWANCARA DENGAN BAPAK Darussalam. SH

POTO-POTO LAMPIRAN

GAMBAR 3

WAWANCARA DENGAN BAPAK AULIA RAHMAN, SH. MH

GAMBAR 4

WAWANCARA DENGAN IBU SISKA DWINDA, SE

POTO-POTO LAMPIRAN

GAMBAR 5
WAWANCARA DENGAN IBU YULFA CINDO SARI, A. Md

GAMBAR 6

WAWANCARA DENGAN BAPAK H.M. ANWAR ALSADAT, SSI